



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 bulan Agustus Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp2.298.905.405.508,00
 - b. Bertambah Rp 10.087.368.616,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.308.992.774.124,00

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp2.518.771.426.224,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 195.207.468.489,00</u> | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp2.713.978.894.713,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp 229.665.842.494,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 244.232.773.095,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 473.898.615.589,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp 9.799.821.778,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 59.112.673.222,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | <u>Rp 68.912.495.000,00</u> |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp 404.986.120.589,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp 0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari:

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1) Semula | Rp 305.359.655.300,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp 305.359.655.300,00 |
| b. Pendapatan Transfer | | |
| 1) Semula | Rp1.993.545.750.208,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 7.087.368.616,00</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp2.000.633.118.824,00 |

| | | |
|---|----|-------------------------|
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 3.000.000.000,00 |

Pasal 4

| | | |
|---|----|---------------------------|
| (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari: | | |
| a. Pajak Daerah; | | |
| 1) Semula | Rp | 91.545.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>5.985.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | 97.530.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah; | | |
| 1) Semula | Rp | 18.099.540.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(3.044.000.000,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 15.055.540.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; | | |
| 1) Semula | Rp | 1.094.064.300,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>58.439.500,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp | 1.152.503.800,00 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; | | |
| 1) Semula | Rp | 194.621.051.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(2.999.439.500,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | 191.621.611.500,00 |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari : | | |
| a. Transfer Pemerintah Pusat; | | |
| 1) Semula | Rp | 1.813.468.309.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>533.818.529,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp | 1.814.002.127.529,00 |

| | | | |
|---|----|-------------------------|-----------------------|
| b. Transfer Antar Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 180.077.441.208,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.553.550.087,00</u> | |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | | Rp 186.630.991.295,00 |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari: | | | |
| a. Pendapatan Hibah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | | Rp 3.000.000.000,00 |
| b. Dana Darurat; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, yang terdiri atas:

| | | | |
|--|----|--------------------------|------------------------|
| a. Belanja Operasi; | | | |
| 1) Semula | Rp | 1.574.926.021.265,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>94.088.279.025,00</u> | |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | | | Rp1.669.014.300.290,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| b. Belanja Modal; | | |
| 1) Semula | Rp 443.422.828.134,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 72.525.981.519,00</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp 515.948.809.653,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga; | | |
| 1) Semula | Rp 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.557.423.245,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp 12.557.423.245,00 |
| d. Belanja Transfer; | | |
| 1) Semula | Rp 490.422.576.825,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 26.035.784.700,00</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp 516.458.361.525,00 |

Pasal 6

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas: | | |
| a. Belanja Pegawai; | | |
| 1) Semula | Rp 980.939.747.566,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 40.422.846.566,00</u> | |
| Jumlah pegawai setelah perubahan | | Rp1.021.362.594.132,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa; | | |
| 1) Semula | Rp 513.502.386.683,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp 55.075.694.625,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp 568.578.081.308,00 |
| c. Belanja Bunga; | | |
| 1) Semula | Rp 8.498.083.516,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp (3.655.416.666,00)</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp 4.842.666.850,00 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------|
| d. Belanja Subsidi; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
| e. Belanja Hibah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 57.497.853.500,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>2.313.954.500,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | | Rp 59.811.808.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Sosial; | | | |
| 1) Semula | Rp | 14.487.950.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>(68.800.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp 14.419.150.000,00 |
| (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas: | | | |
| a. Belanja Modal Tanah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 120.359.900,00 | |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp</u> | <u>(120.359.900,00)</u> | |
| Jumlah modal tanah setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; | | | |
| 1) Semula | Rp | 60.345.176.010,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>61.693.601.036,00</u> | |
| Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp 122.038.777.046,00 |
| c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; | | | |
| 1) Semula | Rp | 74.601.364.024,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>22.221.264.488,00</u> | |
| Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | | Rp 96.822.628.512,00 |

| | | | |
|---|----|----------------------------|--------------------|
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; | | | |
| 1) Semula | Rp | 304.659.593.225,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(11.085.548.100,00)</u> | |
| Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | | 293.574.045.125,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; | | | |
| 1) Semula | Rp | 3.568.741.202,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(176.610.857,00)</u> | |
| Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | | 3.392.130.345,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya; | | | |
| 1) Semula | Rp | 127.593.773,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(6.365.148,00)</u> | |
| Jumlah modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp | | 121.228.625,00 |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | | | |
| a. Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>2.557.423.245,00</u> | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp | | 12.557.423.245,00 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas: | | | |
| a. Belanja Bagi Hasil; | | | |
| 1) Semula | Rp | 11.095.956.325,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | | 11.095.956.325,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 479.326.620.500,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>26.035.784.700,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | | 505.362.405.200,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 229.665.842.494,00

2) Bertambah Rp 244.232.773.095,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 473.898.615.589,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 9.799.821.778,00

2) Bertambah Rp 59.112.673.222,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 68.912.495.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1) Semula Rp 74.365.842.494,00

2) Bertambah Rp 244.232.773.095,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 318.598.615.589,00

b. Pencairan Dana Cadangan;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

| | | | |
|---|----|---------------------------|--------------------|
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 155.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | | 155.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 300.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | | 300.000.000,00 |
| f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
| (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: | | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp | | 3.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; | | | |
| 1) Semula | Rp | 9.799.821.778,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>(9.799.821.778,00)</u> | |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|
| d. Pemberian Pinjaman Daerah; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp | 0,00 |
| e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; | | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>65.912.495.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp | 65.912.495.000,00 |

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset-Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 143 - 2 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003